

NASKAH PUBLIKASI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN BANTUL

Oleh:
DITA WINDA HASTUTI
20160520088

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.
NIK: 19741227200004 163 067

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN BANTUL

Dita Winda Hastuti, Dian Eka Rahmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gedung Ki Bagus Hadikusumo E3 Lantai 1, Kampus Terpadu UMY, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia

Email: ditawindahastuti@gmail.com, dianekarahmawati93@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the representation of women in the 2019 elections in Bantul Regency and analyze what are the factors that influence the choice of women in the 2019 elections in Bantul Regency. This type of research is qualitative, with data collection techniques in the form of documentation and interviews. The analysis technique used is data reduction, data presentation and data verification. Bantul Regency in the representation of women has fulfilled the quota of 30% or more and is precisely inversely proportional to the choice of women who did not reach the 30% quota. Therefore, researchers are interested in making Bantul Regency a case study in this research. The results of this study show that firstly, there was a gap in the number and percentage between women's representation totaling 204 people or equivalent to 46% with the electability of women in the 2019 elections in Bantul Regency only amounting to 4 people or 8.9%. Second, there are additional factors that can be categorized into supporting factors, namely political party support, cadre motivation, family factors, track record and a lot of basis of mass and inhibiting factors namely incumbent who is re-nominating and money politics.

Keywords: Factors influencing women's electability, women's representation in politics, political parties, and elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Kabupaten Bantul dalam keterwakilan perempuan telah memenuhi kuota 30% bahkan lebih dan justru berbanding terbalik dengan keterpilihan perempuan yang tidak sampai pada kuota 30%. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Bantul sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa pertama, ada kesenjangan jumlah dan persentase antara keterwakilan perempuan yang berjumlah 204 orang atau setara dengan 46% dengan keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul hanya berjumlah 4 orang atau 8,9%. Kedua, ada tambahan faktor-faktor yang dapat dikategorisasikan menjadi faktor pendukung yakni dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak dan basis masa yang banyak dan faktor penghambat yakni *incumbent* yang mencalonkan kembali dan *money politic*.

Kata kunci: Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan, representasi perempuan dalam politik, partai politik, dan pemilu.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia melaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Perempuan sudah bisa duduk atau memenuhi posisi di segala aspek terutama politik dan pemerintahan. Dalam UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 dan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2018 Pasal 6 mengatur ketentuan untuk memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dilansir dari tribunjogja.com. Dengan adanya aturan tersebut dapat membuka peluang bagi perempuan untuk dapat bertarung di dalam politik. Di Indonesia sendiri dalam memuat keterwakilan perempuan khususnya di DPR sempat mengalami penurunan persentase sebanyak dapat dikatakan

meningkat dari periode 2009 sampai dengan 2019 sebanyak 3,2% yaitu dari 17,32% menjadi 20,52%. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan ini membawa pengaruh yang besar untuk meningkatkan peran perempuan di dalam politik atau pemerintahan.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan satu kota yaitu Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul yang diikuti oleh 16 partai politik peserta pemilu masing-masing partai tersebut telah memuat keterwakilan perempuan sebesar 30% dan jika ditotal, jumlah caleg perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul ada sebanyak 204 caleg perempuan atau setara dengan 46%, berikut tabelnya:

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah dan Persentase Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	Partai Amanah Nasional (PAN)	15	44	19	56	34
2	Partai Berkarya	10	50	10	50	20
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	11	55	9	45	20
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21	47	24	53	45
5	Partai Demokrat	22	52	20	48	42
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19	43	25	57	44
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	5	50	5	50	10
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	20	45	24	55	44
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	50	5	50	10
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	19	42	26	58	45
11	Partai Kebangkitan Bangsa	15	43	20	57	35

	(PKB)					
12	Partai NASDEM	18	45	22	55	40
13	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	43	12	57	21
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	50	6	50	12
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	8	53	7	47	15
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	50%	1	50	2
Total		204	46	235	54	439

Sumber: Diolah Dari Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa partai PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mempunyai jumlah calon legislatif perempuan terbanyak yaitu berkisar antara 20 sampai 22 orang atau berkisar antara 45%-52% dan semua partai politik telah memuat keterwakilan kuota 30%. Berdasarkan SK-KPU No. 269 Tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum 2019 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 ada sekitar 45 daftar calon terpilih untuk menduduki

jabatan di parlemen, sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU Bantul. Dari 45 alokasi kursi tersebut hanya 4 orang atau 8,9% calon legislatif perempuan yang terpilih untuk DPRD Kabupaten Bantul. Hal ini justru berbanding terbalik dengan keterpilihan caleg perempuan, persentasenya tidak mencapai 30% yaitu hanya 4 orang caleg perempuan terpilih yang datang dari partai politik yang besar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PAN, berikut tabelnya:

Tabel 1. 2 Persentase Jumlah Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Terpilih Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	PKB	0	0	6	100	6
2	GERINDRA	1	12,5	7	87,5	8
3	PDIP	1	9,1	10	90,9	11
4	GOLKAR	1	20	4	80	5
5	PKS	0	0	4	100	4
6	PAN	1	20	4	80	5
7	DEMOKRAT	0	0	2	100	2
8	PBB	0	0	1	100	1
9	PPP	0	0	2	100	2
10	NASDEM	0	0	1	100	1
TOTAL		4	8,9	41	91,1	45

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul

Data tabel di atas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada periode 2014-2019 jumlah calon legislatif perempuan yang berhasil lolos berjumlah 3 orang atau 6,6%, persen dilansir dari jogja.antaranews.com. Tetapi dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar 2,3%, walaupun tidak memenuhi kuota 30% yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Bantul sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Sedangkan untuk keempat partai tersebut menjadi subjek yang akan diteliti karena dari keempat partai politik inilah caleg perempuan terpilih berasal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan di Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi ilmu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu.

2. Memberikan informasi kepada partai politik untuk komitmen dalam memuat keterwakilan perempuan minimal 30%.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Representasi Perempuan Dalam Pemilu

Representasi perempuan merupakan rakyat yang diwakili oleh perempuan, dipilih melalui mekanisme tertentu dengan tujuan untuk menampung aspirasi perempuan yang diwakilinya. Di dalam buku tentang Menyual Data Representasi Perempuan di Lima Ranah oleh (Margret, Panjaitan, Novitasari, & Iksarana, 2018) mengatakan bahwa kebijakan afirmatif yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dari kebijakan afirmatif inilah, yang mulai diberlakukan sejak pemilu tahun 2004 dan sampai sekarang, muncullah representasi perempuan dalam politik yang di dalamnya berbicara tentang keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu dengan ketersediaan kuota 30% dan juga keterpilihan calon legislatif perempuan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam politik yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat berikut uraiannya:

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung representasi perempuan dalam politik (Margret et al., 2018) antara lain:

- 1) Dukungan partai politik, yaitu sebagai mesin demokrasi partai politik tidak diskriminasi dalam merekrut anggota-anggotanya secara gender dan juga mencalonkan kandidat perempuan dengan jumlah yang signifikan.
- 2) Motivasi, yaitu dorongan dari diri sendiri untuk masuk ke ranah politik agar dapat berperan aktif dan dapat memberikan hasil nyata dengan dibuatnya peraturan/kebijakan untuk kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan (memperjuangkan hak-hak perempuan).

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat representasi perempuan dalam politik menurut Matland dalam (Elizabeth, 2018) antara lain:

- 1) Budaya patriarki, yaitu budaya di mana hanya laki-laki yang bisa memimpin sehingga membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan.
- 2) Proses seleksi dalam partai politik, yaitu seleksi yang dilakukan oleh pemimpin partai politik yang didominasi oleh laki-laki yang kemudian berpengaruh juga kepada struktur

kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik.

- 3) Faktor keluarga, faktor ini bisa menjadi penghambat karena terkait dengan izin dari keluarga atau suami (bagi perempuan yang sudah berkeluarga).
- 4) Sistem multi-partai, yaitu banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen sehingga membawa pengaruh terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

2.2 Analisis Gender

Gender dapat diartikan sebagai “perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya” (Puspitawati, 2013). Secara terminologis, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Menurut Mansour Fakih dalam (Nurfilani, 2016) gender adalah sifat yang dikonstruksi secara sosial dan struktural yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat lembut, lemah, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang kuat, maskulin, dan rasional.

Jadi, analisis gender adalah Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari peran, status, fungsi dan posisi dalam kehidupan sosial.

2.3 Pemilu

Indonesia sebagai negara demokrasi menjalankan pemilu untuk memilih pemimpin negara dan calon wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan. Menurut Ali Mertopo dalam (Mulyana, 2016) pemilu adalah:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Sedangkan menurut Morrisan pemilu adalah:

“Cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada beberapa macam tujuan pemilihan umum, adalah: sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dan untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka

melakukan hak asasi warga Negara”
(<http://seputarpengetahuan.co.id>).

Menurut Suryo Untoro pemilu didefinisikan sebagai:

“Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)” (Chacha, 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana yang disediakan untuk masyarakat agar dapat memilih wakil rakyat untuk menduduki kursi pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga berlandaskan pada azas-azas pemilu yaitu (LUBER JURDIL) atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

2.4 Partai Politik

Definisi partai politik menurut para ahli antara lain: Robert Michels mengatakan bahwa partai politik “sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili” (Suantra &

Nurmawati, 2016). Sedangkan partai politik menurut H. Soltou adalah sekelompok orang yang terorganisir dan berbasis politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijakan umum (<http://sosiologis.com/partai-politik>). Definisi berbeda dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, menurutnya partai politik adalah:

“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil” (Budiardjo, 2008).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

Saat ini keterwakilan perempuan di dalam politik atau pemerintahan sudah diatur di dalam UU untuk memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Total keseluruhan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten

Dari definisi partai politik yang disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir, stabil, dan berbasis politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik” (Alfianka, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

a. Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu

Bantul sebanyak 204 orang dalam Pemilu 2019, baik itu total untuk keseluruhan dapil maupun partai politik. Apabila dilakukan perbandingan data caleg perempuan keseluruhan dan caleg perempuan terpilih akan terlihat seperti berikut ini:

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah dan Persentase Caleg Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	PAN	15	44	19	56	34
2	Partai Berkarya	10	50	10	50	20
3	PBB	11	55	9	45	20

4	PDIP	21	47	24	53	45
5	Demokrat	22	52	20	48	42
6	GERINDRA	19	43	25	57	44
7	Partai GARUDA	5	50	5	50	10
8	GOLKAR	20	45	24	55	44
9	HANURA	5	50	5	50	10
10	PKS	19	42	26	58	45
11	PKB	15	43	20	57	35
12	NASDEM	18	45	22	55	40
13	PPP	9	43	12	57	21
14	PSI	6	50	6	50	12
15	PERINDO	8	53	7	47	15
16	PKPI	1	50	1	50	2
Total		204	46	235	54	439

Sumber: Diolah Dari Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Dari tabel terdapat empat partai yang baru ada dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul antara lain Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO). Hal ini dikarenakan partai politik tersebut baru terverifikasi faktual oleh KPU Bantul terkait dengan pengecekan data pengurus, keterwakilan perempuan dan pengecekan alamat bangunan kantor parpol dilansir dari jogja.tribunnews.com.

Persentase caleg perempuan keseluruhan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar 2% dari pemilu di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 44% menjadi 46% pada pemilu 2019. Artinya dengan adanya undang-undang terkait kuota 30% untuk memuat keterwakilan perempuan membawa pengaruh bagi perempuan

untuk maju ke dalam pemilu dan semakin terlihat jelas bagaimana gerakan yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul sendiri, dengan banyaknya calon legislatif perempuan yang maju dalam pemilu untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul.

b. Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menetapkan 45 kursi di DPRD Kabupaten Bantul untuk periode 2019-2024, yang mana jumlah kursi ini juga sama dengan periode sebelumnya. Tetapi dari ke 45 kursi yang diperebutkan di dalam DPRD Kabupaten Bantul, hanya terisi oleh empat caleg perempuan terpilih, berikut tabelnya:

Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2014 dan 2019

No	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	PKB	0	0	6	100	6
2	GERINDRA	1	12,5	7	87,5	8
3	PDIP	1	9,1	10	90,9	11
4	GOLKAR	1	20	4	80	5
5	PKS	0	0	4	100	4
6	PAN	1	20	4	80	5
7	DEMOKRAT	0	0	2	100	2
8	PBB	0	0	1	100	1
9	PPP	0	0	2	100	2
10	NASDEM	0	0	1	100	1
TOTAL		4	8,9	41	91,1	45

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas ada empat caleg perempuan terpilih yakni dua caleg petahana perempuan yakni Arni Tyas Palupi, ST dari Partai Golkar dan Suratun, SH dari PAN. Kemudian dua caleg perempuan terpilih pendatang baru yakni Novi Sarhati dari Partai Gerindra dan Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH dari PDI Perjuangan dan dapat disimpulkan juga bahwa keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul hanya 4 caleg perempuan terpilih atau 8,9% atau dapat dikatakan tidak sebanding dengan keterwakilan dari semua partai politik peserta pemilu yang memuat caleg perempuan dan jika ditotalkan menjadi 204 caleg perempuan atau 46%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul untuk representasi perempuan di parlemen tidak atau belum

memenuhi kuota 30% seperti yang sudah ditetapkan.

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

a. Dukungan Partai Politik

Dari hasil wawancara dengan seluruh narasumber di dalam penelitian ini yaitu dari Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, dan PAN mengatakan bahwa memberikan dukungan kepada semua caleg perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Diperkuat dengan hasil wawancara Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bantul Paldi, S. IP mendukung dengan memberikan kesempatan kepada caleg perempuan untuk maju. Kemudian Arni Tyas Palupi caleg petahana perempuan terpilih dari Partai Golkar, beliau mengatakan partai sangat mendukung 44 caleg

yang maju dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif ke masyarakat.

Artinya dengan dibuatnya peraturan yang harus memuat keterwakilan perempuan sebesar 30%, secara tidak langsung membuat partai politik harus memuat keterwakilan perempuan di dalam pencalegkan dan memberikan dukungan dan motivasi lebih kepada caleg perempuan untuk maju. Mengingat narasumber yang diwawancarai berasal dari partai politik yang dapat dikatakan partai besar, dengan basis masa yang besar pula sehingga dapat membuka peluang keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu di Kabupaten Bantul. Bentuk dukungan yang diberikan oleh partai politik seperti memberikan motivasi dan memberikan bekal kepada caleg khususnya perempuan. Setelah hasil keluar pun partai politik juga masih memberikan dukungan kepada caleg perempuan yang tidak terpilih dengan mengikutsertakan ke dalam agenda atau event yang diadakan oleh Partai Politik.

b. Motivasi Kader

Partai Golkar, Gerindra, dan PDIP mengalami peningkatan untuk caleg perempuan dari segi jumlah dan persentase, kecuali PAN yang cenderung stabil. Peningkatan yang terjadi juga karena adanya motivasi dari kader perempuan itu sendiri untuk maju dengan alasan

selain untuk memenuhi keterwakilan perempuan, untuk pembangunan dan infrastruktur, ada yang sekedar mencoba untuk tahu bagaimana pertarungan di dalamnya, ada satu alasan lainnya yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Arni Tyas Palupi, ST caleg petahana perempuan terpilih dari Partai Golkar, beliau maju karena motivasi diri sendiri dikarenakan beliau sudah ada ketertarikan untuk terjun ke dalam politik dan memiliki keluarga yang memang berlatar belakang politik. Kemudian Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH caleg perempuan terpilih pendatang baru dari PDI Perjuangan, majunya beliau dalam pencalegkan juga karena beliau merasa akan berguna apabila bisa membantu masyarakat dalam proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

Motivasi kader juga dapat mempengaruhi keterpilihan seorang caleg perempuan dalam pemilu. Motivasi yang datang dari kader perempuan itu sendiri akan lebih bekerja ketika mereka berkompetisi di dalam pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan partai politik dan motivasi kader menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keterpilihan perempuan dan faktor lainnya juga yang ditemukan di lapangan adalah

basis masa yang banyak dan juga rekam jejak seorang caleg juga dapat mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu.

c. Budaya Patriarki

Budaya patriarki bisa menjadi penghambat bagi caleg perempuan untuk maju ke dalam politik atau pemerintahan. Tetapi peneliti menemukan fakta pada saat melakukan wawancara dengan seluruh narasumber bahwa budaya patriarki saat ini tidak menjadi suatu budaya yang kental di masyarakat. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang sudah mulai bergeser dengan adanya kesetaraan gender di segala aspek yang salah satunya adalah politik atau pemerintahan. Ini diperkuat dengan hasil wawancara dari caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari PAN Padmini beliau mengatakan budaya patriarki saat ini sudah mulai berkurang dimasyarakat karena ini sudah peka terhadap kesetaraan gender.

Masyarakat yang sebelumnya berpikir bahwa kepemimpinan harus berada di pundak laki-laki mulai tergeser dengan pemikiran bahwa perempuan juga bisa memimpin, walaupun dengan peran ganda yang mereka miliki. Yang jelas apabila seorang perempuan sudah menjadi pemimpin atau anggota legislatif, harus bisa memprioritaskan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri

dengan tugasnya di dalam pemerintahan atau politik.

d. Proses Seleksi Dalam Partai Politik

Seluruh narasumber mengatakan bahwa proses seleksi dalam partai politik tidak ada hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu, hal ini dikarenakan keterpilihan perempuan dalam pemilu balik lagi ke caleg perempuan yang bertarung di dalam pemilu, apa strategi yang digunakan untuk mendapatkan massa, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat saat melakukan sosialisasi dan kampanye di masyarakat. Ini diperkuat dengan jawabannya Arni Tyas Palupi caleg petahana perempuan terpilih dari Golkar tidak mempengaruhi, tetapi balik lagi bagaimana caleg perempuan yang bertarung.

e. Faktor keluarga

Faktor keluarga dapat menjadi penghambat bagi caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Ini dikarenakan peran ganda yang dimiliki seorang caleg perempuan itu sendiri, di satu sisi harus mengurus urusan rumah tetapi di satu sisi juga harus fokus untuk melakukan kampanye dan sosialisasi ke masyarakat. Hasil wawancara dengan caleg perempuan terpilih dan tidak terpilih mengatakan bahwa faktor keluarga yang secara teori menghambat perempuan untuk terpilih di dalam pemilu,

malah menjadi faktor pendukung utama.

Dari beberapa narasumber yang di wawancarai juga berasal dari keluarga yang memang mempunyai latar belakang politik, sehingga itu dapat menjadi modal utama seorang caleg perempuan untuk mendapatkan massa dan suara yang banyak. Tetapi bukan berarti dengan keluarga yang sudah lebih dulu berada di dalam politik akan tercipta yang namanya dinasti politik. Ini diperkuat dengan hasil wawancara caleg petahana perempuan terpilih dari PAN,

f. Sistem Multi-partai

Sistem multi-partai tidak menjadi penghambat bagi para caleg perempuan karena dari sinilah dengan begitu banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu terutama caleg perempuan yang maju untuk saling mendukung satu sama lain, tidak menganggap caleg perempuan lainnya sebagai pesaing. Seperti yang di katakan caleg perempuan tidak terpilih dari PAN, Padmini beliau mengatakan banyaknya partai ini malah menjadikan caleg perempuan satu sama lain. Peneliti malah menemukan faktor penghambat keterpilihan lainnya yang dihadapi oleh caleg perempuan tidak terpilih antara lain *incumbent* yang

Suratun, beliau mendapatkan dukungan yang besar dari keluarga terutama suami dan anaknya dengan memberikan motivasi dan semangat, bahkan teman beliau juga mendukung beliau untuk maju ke parlemen. Kemudian, Novi Sarhati caleg perempuan pendatang baru terpilih dari Gerindra mendapatkan dukungan dari keluarga terutama suami yang selalu memberikan motivasi dan support yang besar kepada beliau.

mencalonkan dirinya kembali dan *money politic*. Seperti yang dikatakan oleh Sri Wardani caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih Partai Gerindra yaitu *incumbent* yang maju menjadi penghambat karena menurut beliau mereka sudah lebih dulu berkiprah dimasyarakat dan juga amplop yang bertebaran di serangan fajar . Hal senada juga dikatakan oleh Sri Lestari caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih PDIP yaitu karena adanya *incumbent* yang sudah maju sehingga memiliki modal awal untuk mendapatkan masa. Berikut adalah tabel kategorisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul:

Tabel 1. 3 Kategorisasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Faktor-faktor	PDIP	GOLKAR	PAN	GERINDRA
1	Dukungan Partai Politik	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
2	Motivasi Kader	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
3	Faktor Keluarga	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
4	Rekam jejak	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
5	Basis Masa yang Banyak	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
6	<i>Incumbent</i> yang mencalonkan kembali	Penghambat	Penghambat	Penghambat	Penghambat
7	<i>Money Politic</i>	Penghambat	Penghambat	Penghambat	Penghambat

Sumber: Diolah Dari Hasil Wawancara

Dari tabel di atas setelah dikategorisasikan ada 5 faktor pendukung yaitu dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak, dan basis masa yang banyak. Selanjutnya yang termasuk ke dalam faktor penghambat ada 2 yaitu *incumbent* yang mencalonkan kembali dan *money politic*. Kemudian proses seleksi dalam partai politik tidak termasuk ke dalam kategorisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan karena balik lagi kepada caleg perempuannya bagaimana mereka bertarung di dalam pemilu.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak, dan basis masa yang banyak. Faktor penghambatnya antara lain *Incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dan *money politic*.

2. Representasi

perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari keterwakilan caleg perempuan dan keterpilihan caleg perempuan, sebagai berikut:

- a. Keterwakilan calon legislatif perempuan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada persentasenya dari 44% menjadi 46%. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang harus memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30% berjalan dengan baik, walaupun hanya meningkat 2% di pemilu 2019. Peraturan yang ada ini membuat dan mengharuskan partai politik untuk memenuhi kuota 30%, karena apabila dari partai politik tidak memenuhi kuota tersebut tidak dapat mendaftarkan partainya menjadi peserta pemilu. Dari 16 partai politik peserta pemilu, semuanya telah mengusung

atau memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30% bahkan lebih.

- b. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul juga mengalami peningkatan sebanyak 2,3% di pemilu 2019, dari 6,6% atau 3 orang caleg perempuan menjadi 8,9% atau setara dengan 4 caleg perempuan terpilih dari 45 kursi yang diperebutkan dan duduk di DPRD Kabupaten Bantul yaitu Arni Tyas Palupi, ST (Golkar), Suratun, SH (PAN), Novi Sarhati (Partai Gerindra) dan Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH (PDIP). Sehingga dapat kita lihat bahwa keterpilihan dengan keterwakilan caleg perempuan berbanding terbalik, ini dikarenakan keterpilihan perempuan yang duduk di parlemen tidak mencapai kuota 30%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 yang diberikan kepada caleg perempuan tidak terpilih, partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, caleg perempuan tidak terpilih untuk lebih meningkatkan kualitas diri seperti lebih mempersiapkan diri jauh hari agar dapat menghadapi *incumbent* yang mencalonkan kembali, menjalin hubungan baik dengan masyarakat banyak, menjalin hubungan atau relasi dengan tokoh besar dan berpengaruh yang sekiranya bisa mengangkat nama caleg perempuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Alfianka, N. (2018). *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Bekerjasama dengan STKIP PGRI Sumbar Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chacha, T. (2018). 9 Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli dan Secara Umum serta UU. Retrieved from <https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/> diakses 10 Juli 2019.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. 2018. Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender. Depok: LP3ES.
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. Depok: Cakra Wikara Indonesia. Retrieved from <https://bit.ly/2mXsaRG> (30 September 2019).
- Mulyana, A. M. (2016). *Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa (Studi Deskriptif pada Kesadaran Politik Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung)*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/13193/>
- Nurfilani, T. M. (2016). Keterwakilan Perempuan di DPRK Subussalam Tahun 2014. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(1). Retrieved from http://repository.unimal.ac.id/4157/1/8_Nurfilani_dan_Teuku_Muzaffarsyah.pdf (26 April 2019).
- Puspitawati, H. (2013). Kosep, Teori, dan Analisis Gender. *PT IPB Press*, 4, 1–16.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*.

- Yogyakarta: Garudhawaca.
Retrieved from
<https://bit.ly/2JALBXQ> (23 Juni
2019).
- Suantra, I. N., & Nurmawati, M.
(2016). Bahan Ajar Partai
Politik Dan Pemilihan Umum.
Denpasar. Retrieved from
<https://bit.ly/32o8XZB> (11 Juli
2019).
- <http://sosiologis.com/partai-politik> (1
Agustus 2019).
- [https://jogja.tribunnews.com/2018/07
/12/parpol-patuhi-aturan-kuota-
30-persen-caleg-perempuan](https://jogja.tribunnews.com/2018/07/12/parpol-patuhi-aturan-kuota-30-persen-caleg-perempuan) (19
Juli 2019).
- <https://jogja.antaranews.com/berita/3>
22368/tingkat-keterwakilan-
perempuan-dprd-bantul-66-
persen (5 September 2019).
- [https://www.seputarpengetahuan.co.i
d/2017/09/pengertian-pemilu-
tujuan-fungsi-asas-bentuk-
sistem.html](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html) (10 Juli 2019).
- Website Resmi Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Republik
Indonesia:
[https://infopemilu.kpu.go.id/pile
g2019/dapil/view](https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view) (25 Juli
2019).
- Website Resmi Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten
Bantul: <https://bantul.go.id/> (28
Oktober 2019).